

"Dilema Etika dalam Asesmen Psikologi: Tantangan di Bidang Bimbingan dan Konseling"

Nurisma Elok Fadila *¹

¹ Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Surabaya

*e-mail : 240100141322@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Kerahasiaan dalam proses penilaian adalah elemen penting yang perlu dijaga demi melindungi hak-hak peserta dan menjaga keabsahan hasil penilaian. Penilaian, baik dalam ranah psikologi, pendidikan, maupun rekrutmen, meliputi pengumpulan informasi pribadi dan data sensitif lainnya. Oleh karenanya, menjaga kerahasiaan data peserta tidak hanya merupakan tanggung jawab moral, tetapi juga merupakan tindakan pencegahan untuk mencegah penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan individu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti dan memahami gagasan etika dalam penilaian psikologi serta tantangan yang ada dalam bimbingan dan konseling. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang memanfaatkan tinjauan pustaka yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi melalui pencarian dan pembacaan dari sumber-sumber tertulis, seperti makalah, tulisan, atau buku digital. Dari hasil riset ini, dapat disimpulkan bahwa penilaian mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran dengan berbagai cara. Penting untuk menjaga kerahasiaan hasil guna melindungi privasi para peserta. Objektivitas seringkali terganggu oleh prasangka dan keterbatasan sarana, sehingga dibutuhkan pelatihan serta fasilitas yang memadai. Dilema etis muncul berkaitan dengan tekanan dan evaluasi terhadap aspek-aspek subjektif. Dalam konteks konseling, penilaian berperan dalam memahami klien tetapi terbatas oleh prasangka dan sumber daya yang ada. Penilaian harus mengikuti prinsip-prinsip kerahasiaan, objektivitas, dan etika agar hasil yang diperoleh menjadi valid dan bermanfaat.

Kata kunci: Asesmen, Psikologi, Etika, BimbinganKonseling

Abstract

Confidentiality in the assessment process is an important element that needs to be maintained in order to protect the rights of participants and maintain the validity of the assessment results. Assessment, whether in the realm of psychology, education, or recruitment, involves the collection of personal information and other sensitive data. Therefore, maintaining the confidentiality of participant data is not only a moral responsibility, but also a precautionary measure to prevent misuse of information that can harm individuals. The purpose of this study is to examine and understand the concept of ethics in psychological assessment and the challenges that exist in guidance and counseling. The method applied in this study is a qualitative approach that utilizes a literature review conducted by collecting information through searching and reading from written sources, such as journals, articles, or e-books. From this study, it can be concluded that assessment evaluates the learning process and outcomes in various ways. It is important to maintain the confidentiality of the results in order to protect the privacy of the participants. Objectivity is often compromised by prejudice and limited resources, so adequate training and facilities are needed. Ethical dilemmas arise related to pressure and evaluation of subjective aspects. In the context of counseling, assessment plays a role in understanding clients but is limited by prejudice and available resources. Assessment must follow the principles of confidentiality, objectivity, and ethics so that the results obtained are valid and useful.

Keywords: Assessment, Psychology, Ethics, Guidance and Counseling

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

BK adalah layanan yang diberikan untuk membantu siswa dalam meraih pengembangan diri yang optimal, di mana layanan ini didasarkan pada keahlian khusus yang dimiliki oleh konselor sekolah atau guru BK (Agatha et al., 2023). Dari penjelasan ini, dapat dipahami bahwa proses Konseling tidak bisa dilakukan tanpa perencanaan, karena konselor atau guru BK perlu dilengkapi

dengan sejumlah keterampilan khusus yang relevan dengan area ini. Keterampilan tersebut tak hanya mencakup profesionalisme, tetapi juga harus melibatkan kemampuan sosial, pengajaran, dan aspek pribadi. Sesuai dengan pendapat Siswanto dalam (Agatha et al. , 2023), baik konselor maupun guru BK perlu menjalankan tugas mereka dengan mematuhi prinsip etika. Pelaksanaan bimbingan dan konseling hendaknya berlandaskan pada kode etik. Salah satu prinsip etis dalam BK adalah bahwa setiap konselor dan guru BK perlu memiliki sikap, nilai, wawasan, serta keterampilan yang berkaitan dengan aspek BK. (Agatha et al. , 2023)

Bimbingan serta konseling perlu dilaksanakan sesuai dengan tata aturan etika. Salah satu prinsip etis dalam BK adalah bahwa setiap konselor dan guru BK harus memiliki sikap, nilai, pengetahuan, dan kemampuan terkait dengan bidang BK. (Nurmaulidya et al. , 2019) Bimbingan serta konseling perlu dilaksanakan sesuai dengan tata aturan etika. Salah satu prinsip etis dalam BK adalah bahwa setiap konselor dan guru BK harus memiliki sikap, nilai, pengetahuan, dan kemampuan terkait dengan bidang BK. Bimbingan serta konseling perlu dilaksanakan sesuai dengan tata aturan etika. Salah satu prinsip etis dalam BK adalah bahwa setiap konselor dan guru BK harus memiliki sikap, nilai, pengetahuan, dan kemampuan terkait dengan bidang BK. (Nurmaulidya et al. , 2019)

Kehadiran kode etik di setiap profesi bertujuan untuk melindungi kehormatan dan martabat profesi serta menghindari masyarakat terhadap segala jenis penyimpangan dan penyalahgunaan. Kode etik profesi berperan dalam meyakinkan publik bahwa mereka bukan hanya dilihat sebagai alat, tetapi juga sebagai tujuan dari layanan yang diberikan. (Pedhu, 2020) Kode etik berfungsi seperti kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan memastikan standar moral profesi tersebut di mata masyarakat. Fisher menekankan dalam (Pedhu, 2020) bahwa pada intinya, kode etik memberikan identitas bagi profesi tertentu, mengkomunikasikan harapan profesi kepada anggotanya, serta membantu menjaga kepercayaan publik. Aspek ini sangat penting untuk diperhatikan karena praktik konseling dan psikologi didasarkan pada kompetensi, profesionalisme, dan kepercayaan (Pedhu, 2020).

Oleh sebab itu, setiap anggota profesi diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan cara yang profesional. Layanan pengujian dan pengukuran di sektor konseling dan psikologi juga mengikuti prinsip-prinsip yang terdapat dalam etika profesional. Ini juga berlaku untuk bimbingan dan konseling. Sebagai sebuah profesi, Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) telah membuat kode etik untuk membantu para konselor dalam memberikan layanan yang berkualitas. Kode etik dalam konseling dan psikologi berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mengatur tindakan para konselor dan psikolog saat menghadapi isu-isu etika dan hukum dalam pelaksanaan pengujian dan pengukuran. Penerapan tes psikologi dalam bimbingan dan konseling mengikuti kode etik sebagai bentuk pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap martabat individu klien sebagai subjek dalam layanan atau perlakuan. (Pedhu, 2020).

Penyelenggaraan serta pelaksanaan kegiatan konseling dan asesmen selalu dihadapkan pada berbagai masalah yang mengharuskan Konselor harus beroperasi sesuai dengan norma etika yang ada. Sering kali, mereka menghadapi berbagai dilema etis. Memutuskan dalam situasi semacam itu bukanlah perkara yang sederhana, namun hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab seorang konselor atau psikolog. Karakter dan pengetahuan yang dimiliki oleh konselor dan psikolog sangatlah penting. Tennyson dan Strom dalam (Pedhu, 2020) menekankan bahwa saat mengambil keputusan yang berhubungan dengan etika, konselor harus berpikir dengan hati-hati. Pilihan yang diambil oleh konselor seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip etika, yaitu (1) beneficence/tindakan baik (melaksanakan hal yang bermanfaat dan menghindari dampak negatif), (2) nonmaleficence (tidak menimbulkan kerugian atau penderitaan), (3) autonomy/otonomi (memberikan kebebasan untuk

memilih dan membuat keputusan secara mandiri), (4) justice/keadilan, dan (5) fidelity/kesetiaan (tetap setia pada komitmen).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara menjaga kerahasiaan hasil asesmen klien?
2. Tantangan apa saja yang menjadi objektivitas dalam asesmen?
3. Solusi apa saja yang dapat menjaga objektivitas dalam asesmen?
4. Faktor-faktor apa yang menyebabkan munculnya dilema etika dalam asesmen psikologi oleh konselor atau praktisi bimbingan dan konseling?
5. Bagaimana dampak dilema etika tersebut terhadap hasil asesmen dan proses konseling secara keseluruhan?

Tujuan Penulisan

1. Menjelaskan bagaimana cara menjaga kerahasiaan hasil tes atau asesmen klien.
2. Mengungkap tantangan atau hambatan yang bisa memengaruhi kejujuran dan keadilan (objektivitas) dalam asesmen.
3. Memberikan solusi atau cara agar asesmen tetap dilakukan secara objektif.
4. Menjelaskan apa saja faktor yang bisa menyebabkan munculnya dilema etika dalam asesmen psikologi oleh konselor atau praktisi bimbingan dan konseling.
5. Menjelaskan dampak dari dilema etika terhadap hasil asesmen dan jalannya proses konseling.

KAJIAN TEORI

Pengertian Asesmen PSikologi

Asesmen dipahami oleh Stiggins dalam (Ummah, 2019) Sebagai suatu evaluasi terhadap proses, kemajuan, dan hasil pembelajaran siswa. Sementara itu, Kumano dalam (Ummah, 2019) menggambarkan sebagai "proses pengumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan pembelajaran". Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa asesmen adalah istilah yang tepat untuk merepresentasikan evaluasi terhadap proses belajar siswa. Walaupun penting untuk menilai proses pembelajaran siswa dalam asesmen, hasil belajar juga wajib diperhatikan. Asesmen dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu asesmen tradisional dan asesmen alternatif. Asesmen tradisional mencakup tes benar-salah, pilihan ganda, melengkapi, dan tes dengan jawaban terbatas. Sementara itu, asesmen alternatif (non-tes) meliputi esai atau uraian, penilaian praktik, proyek, kuesioner, inventori, daftar cek, penilaian rekan sejawat, penilaian diri, portofolio, observasi, diskusi, dan wawancara.

Menurut Wiggins dalam (Ummah, 2019), penilaian berfungsi sebagai sarana yang membantu pengajar untuk mengawasi perkembangan siswa secara bertahap. Oleh karena itu, penilaian seharusnya menjadi komponen penting dalam proses pembelajaran, bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Pada dasarnya, penilaian berfokus pada pengukuran terhadap cara siswa memahami materi. Terkait dengan hal ini, Marzano dalam (Ummah, 2019) menyatakan bahwa untuk menunjukkan sejauh mana siswa memahami suatu konsep, penilaian tidak hanya mencakup apa yang telah mereka pelajari, tetapi juga mengenai cara mereka mendapatkan pemahaman tersebut. Dalam hal ini, penilaian tidak hanya mampu menilai hasil dan proses pembelajaran siswa, tetapi juga kemajuan mereka dalam belajar.

Kerahasiaan dalam Asesmen

Kerahasiaan dalam proses penilaian adalah elemen penting yang perlu dilindungi untuk memastikan hak-hak para peserta serta keabsahan hasil penilaian. Penilaian, baik dalam bidang psikologi, pendidikan, maupun dalam proses rekrutmen, melibatkan pengumpulan data pribadi serta

informasi sensitif lainnya. Oleh karena itu, menjaga kerahasiaan informasi peserta bukan hanya merupakan tanggung jawab moral, tetapi juga tindakan pencegahan untuk mencegah penyalahgunaan data yang dapat merugikan individu. Menurut Santoso dan Wijaya (2021), perlindungan kerahasiaan data peserta dalam penilaian berperan dalam menjaga hak privasi individu dan menghindari penyalahgunaan informasi yang dapat merusak peserta. Mereka menggarisbawahi bahwa pelanggaran terhadap kerahasiaan bisa mengakibatkan efek psikologis yang merugikan bagi peserta, seperti perasaan cemas dan stres, serta dapat merusak reputasi lembaga yang mengadakan penilaian.

Dalam psikometri, menjaga kerahasiaan merupakan salah satu prinsip etika yang perlu ditegakkan oleh para pelaksana asesmen agar data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk maksud yang telah disetujui. Rahman (2020) menyebutkan bahwa orang yang melakukan asesmen wajib memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari peserta hanya dapat diakses oleh orang-orang yang memiliki izin dan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Ini sesuai dengan prinsip etika profesional yang menekankan pentingnya menghormati privasi dan hak individu dalam pengumpulan, penyimpanan, serta distribusi informasi.

Selain itu, penerapan privasi dalam evaluasi tidak hanya berkaitan dengan perlindungan informasi, tetapi juga menjamin bahwa akses terhadap data dibatasi hanya untuk pihak yang berwenang. Penelitian oleh Putri dan rekan-rekannya (2023) menunjukkan bahwa keterbukaan mengenai cara pengelolaan data dan mekanisme perlindungan privasi dapat meningkatkan rasa percaya peserta, sehingga mereka merasa lebih aman dan lebih bersedia untuk bekerjasama selama proses evaluasi. Ini sejalan dengan prinsip etika dalam bidang psikologi dan pendidikan yang menekankan penghormatan terhadap hak individu. Penggunaan teknologi dalam proses evaluasi juga menghadirkan tantangan baru dalam menjaga kerahasiaan informasi. Nirwana dan rekan-rekannya (2024) dalam penelitian mereka tentang kebijakan keamanan siber menekankan pentingnya penerapan sistem perlindungan data pribadi yang efektif, seperti enkripsi dan pengaturan akses, untuk mencegah kebocoran data. Mereka juga menyoroti pentingnya kerja sama antar lembaga serta regulasi yang jelas untuk menjamin pengelolaan data pribadi yang aman di era digital ini.

Oleh karena itu, melindungi kerahasiaan dalam evaluasi bukan sekadar tanggung jawab moral, melainkan juga elemen penting yang vital untuk menjamin mutu dan keandalan hasil evaluasi. Para profesional dan institusi yang melakukan evaluasi harus menjamin kepatuhan terhadap norma etika dan peraturan yang ada, serta menerapkan tindakan teknis yang sesuai untuk melindungi informasi peserta.

Objektivitas dan Tantangan dalam Asesmen

Objektivitas dalam evaluasi pendidikan menjadi hal yang sangat penting agar hasil penilaian dapat mencerminkan kemampuan siswa dengan tepat dan adil. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fauzani, Senen, dan Retnawati (2021), selama proses belajar secara online di periode pandemi COVID-19, para guru mengalami banyak tantangan dalam melaksanakan penilaian sikap secara online. Kendala ini tidak hanya disebabkan oleh pemahaman guru mengenai metode penilaian, tetapi juga melibatkan peran orang tua dan siswa dalam proses evaluasi, yang memengaruhi objektivitas hasil penilaian. Selain itu, studi yang dilakukan oleh Wulandari dan Hermanto (2022) menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman guru mengenai standar penilaian yang sah dan dapat dipercaya menjadi masalah utama dalam pelaksanaan asesmen. Akibatnya, validitas dan reliabilitas hasil penilaian yang diperoleh menjadi rendah, sehingga sulit untuk mencapai objektivitas dalam evaluasi. Mereka menekankan pentingnya adanya pelatihan yang mendalam dan terus-menerus bagi

guru agar dapat mengembangkan instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan standar yang ada.

Tantangan lain yang dihadapi dalam pelaksanaan evaluasi adalah kurangnya fasilitas dan infrastruktur, khususnya di lembaga pendidikan yang berada di daerah yang jauh. Nurhadi dan Lestari (2023) menyatakan bahwa kesulitan dalam mengakses teknologi menjadi hambatan signifikan untuk melaksanakan evaluasi berbasis komputer yang sebenarnya dapat meningkatkan objektivitas penilaian. Selain itu, budaya dan kebiasaan dalam proses evaluasi juga masih berpengaruh pada subjektivitas guru saat memberikan nilai, sehingga perlu adanya perubahan cara pandang dalam pelaksanaan evaluasi. Dengan demikian, untuk mencapai objektivitas dalam evaluasi pendidikan, diperlukan kerja sama antara peningkatan kapasitas guru, penyediaan fasilitas yang memadai, serta perbaikan kebijakan penilaian yang mendukung standar penilaian yang jelas dan terukur. Hanya dengan cara ini, hasil evaluasi dapat menunjukkan pandangan yang tepat dan objektif mengenai kemampuan siswa.

Dilema Etika dalam Praktik Asesmen

Praktik evaluasi dalam sektor pendidikan tidak hanya berfungsi untuk menilai kemampuan dan pencapaian siswa, tetapi juga memiliki aspek etika yang sangat penting untuk diperhatikan. Di dalam konteks pendidikan di Indonesia, masalah etika sering kali muncul, terutama ketika guru dan pendidik dituntut untuk memberikan penilaian yang objektif, adil, dan transparan, sementara mereka juga harus mempertimbangkan keadaan dan konteks siswa yang sangat beragam (Rohman, 2021). Salah satu tantangan etika yang paling terlihat adalah bagaimana menjaga integritas penilaian ketika ada tekanan dari berbagai pihak, seperti orang tua, sekolah, atau bahkan siswa itu sendiri. Tekanan ini kadang-kadang mendorong guru untuk menerapkan praktik penilaian yang tidak sepenuhnya objektif, seperti memberikan nilai yang lebih tinggi dari seharusnya demi menjaga hubungan baik atau menghindari konflik. Tentu saja, hal ini dapat merusak kepercayaan terhadap proses evaluasi dan menimbulkan ketidakadilan bagi siswa lainnya (Putra dan Sari, 2022).

Selain itu, dalam penilaian afektif dan psikomotor, terutama pada mata pelajaran yang fokus pada pengembangan karakter seperti Pendidikan Agama Islam dan Aqidah Akhlak, para pengajar kerap menemui tantangan ketika harus menilai dengan objektif. Unsur-unsur yang bersifat internal dan subjektif sering kali sulit untuk diukur secara angka, yang menciptakan potensi terjadinya penilaian yang bias dan tidak etis. Terbatasnya waktu dan sumber daya juga memperburuk situasi ini, mendorong guru untuk membuat pilihan sulit dalam menyeimbangkan ketepatan penilaian dengan keterbatasan yang ada (Putra dan Sari, 2022).

Di zaman digital saat ini, pemanfaatan teknologi dalam penilaian, seperti ujian online, menciptakan dilema etika baru. Contohnya, penggunaan teknologi pengawasan yang berbasis kecerdasan buatan (AI) bisa meningkatkan keandalan penilaian, namun juga menimbulkan perhatian mengenai privasi dan keadilan bagi siswa yang mungkin menghadapi masalah teknis atau ketidakmerataan dalam akses ke teknologi (Rohman, 2021). Oleh karenanya, sangat penting bagi pendidik dan lembaga pendidikan untuk menciptakan panduan etika yang jelas serta sistem pengawasan yang efektif dalam praktik penilaian. Pendidikan dan pelatihan terus-menerus untuk guru tentang etika penilaian juga sangat diperlukan agar dilema ini bisa diminimalkan dan kepercayaan terhadap proses penilaian tetap terjaga dengan baik (Putra dan Sari, 2022; Rohman, 2021).

METODE

Penelitian ini mengintegrasikan metode literatur dengan pendekatan kualitatif, dengan penekanan pada cara pengumpulan data melalui tinjauan pustaka yang terutama menggunakan buku

atau sumber literatur. Menurut Zed ((Zed, 2014)), ada beberapa inisiatif yang mengajak untuk membaca, merekam, dan memproses materi penelitian yang terkumpul sebagai bagian dari cara pengumpulan data yang berfokus pada sumber perpustakaan. Analisis literatur ini tidak melibatkan observasi langsung di lokasi untuk mendapatkan respons dari subjek, karena informasi diperoleh dari sumber-sumber literatur, terutama buku dan dokumen yang telah dipindai, dicatat, dan dievaluasi.

Kumpulan literatur tersebut menjadi pondasi pemikiran dalam penelitian ini dan memberi kontribusi untuk penyusunan artikel. Penelitian ini menganalisis data yang ada dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Penulis melakukan ini untuk mengeksplorasi masalah secara menyeluruh dan menghubungkannya dengan peraturan yang ada.

Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, tidak semua analisis perlu dilakukan di tempat. Namun, secara umum, analisis lebih sering dibatasi pada kegiatan studi pustaka, seperti dalam analisis ini. Menurut (Zed, 2014), terdapat sedikitnya tiga alasan untuk membatasi analisis pada studi pustaka, yaitu (1) masalah yang dianalisis hanya bisa dijawab melalui penelitian pustaka, dan jika tidak, tidak mungkin mendapatkan informasi dari analisis lapangan, (2) penelitian awal dilakukan untuk memahami fenomena yang ada dalam masyarakat, dan (3) sumber pustaka tetap dapat dipercaya dalam menjawab masalah analisis. Penelitian ini mengadopsi metode studi pustaka karena sifat manusia dan pendidikan sepanjang hayat bersifat teoritis dan filosofis, sehingga memerlukan kajian yang mendalam terhadap konsep-konsep dan pemikiran yang telah diuraikan para ahli. Dengan menggunakan teknik perpustakaan, peneliti akan mengakses berbagai sudut pandang dari artikel ilmiah, jurnal, dan buku yang relevan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Cara Menjaga Kerahasiaan Hasil Asesmen

Menjaga kerahasiaan hasil evaluasi adalah hal yang sangat penting dalam pelaksanaan asesmen, baik di bidang psikologi, pendidikan, maupun sektor lainnya yang menerapkan metode pengukuran untuk mengumpulkan informasi pribadi peserta. Tujuan dari kerahasiaan ini adalah untuk melindungi hak privasi peserta dan juga untuk menjaga kepercayaan terhadap proses evaluasi. Rahmawati dan Sari (2020) mengungkapkan bahwa menjaga kerahasiaan hasil evaluasi bukan hanya merupakan tanggung jawab moral, tetapi juga merupakan keharusan profesional yang wajib dijunjung oleh setiap praktisi di bidang asesmen. Mereka menekankan pentingnya penyimpanan data hasil evaluasi dengan cara yang aman, baik itu secara fisik maupun digital, dengan penerapan kontrol ketat terhadap akses data. Penggunaan media penyimpanan yang aman, seperti berkas yang terkunci atau sistem penyimpanan elektronik yang dilengkapi dengan enkripsi, dapat mencegah pihak tidak berwenang untuk mengakses informasi tersebut dan mengurangi kemungkinan terjadinya kebocoran data.

Selanjutnya, Dewi dan Nugroho (2022) menekankan betapa pentingnya aspek etis dalam menjaga kerahasiaan hasil penilaian. Mereka berpendapat bahwa para profesional dalam bidang penilaian perlu memiliki kesadaran dan integritas yang tinggi untuk menjaga keamanan data, termasuk dalam memberikan izin hanya kepada mereka yang berhak dan memerlukan informasi itu. Proses pemberian akses ini hendaknya dilakukan setelah mendapatkan persetujuan yang jelas dari peserta atau wali peserta jika berhubungan dengan anak di bawah umur. Selain itu, sangat penting untuk menyampaikan dengan jelas mengenai kebijakan kerahasiaan kepada peserta di awal proses penilaian, agar mereka mengerti bagaimana informasi mereka akan dikelola dan dimanfaatkan. Hal

ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan peserta, tetapi juga mengurangi risiko terjadinya konflik atau pelanggaran etika yang mungkin muncul akibat kesalahpahaman.

Dalam bidang teknis, pemanfaatan teknologi informasi menjadi alternatif yang efisien untuk menjaga kerahasiaan hasil penilaian. Sistem pengelolaan data digital dengan fitur-fitur keamanan seperti enkripsi informasi, verifikasi pengguna, dan registrasi jejak akses dapat membantu menjamin bahwa hanya individu yang memiliki wewenang yang bisa mengakses hasil evaluasi (Rahmawati dan Sari, 2020). Meski begitu, teknologi ini perlu disertai dengan pelatihan dan peningkatan kesadaran bagi petugas yang mengelola data untuk mencegah terjadinya pelanggaran, baik yang disebabkan oleh kelalaian maupun secara sengaja. Di samping itu, Dewi dan Nugroho (2022) juga menekankan bahwa menjaga kerahasiaan hasil penilaian merupakan bagian dari kode etik profesi yang wajib dipatuhi oleh setiap praktisi, terutama di bidang pendidikan dan psikologi. Pelanggaran atas kerahasiaan tidak hanya merugikan individu peserta, tetapi juga bisa merusak citra lembaga dan menurunkan kepercayaan terhadap proses penilaian secara keseluruhan. Maka dari itu, sangat krusial untuk menetapkan peraturan internal dan melaksanakan pengawasan secara rutin terhadap pengelolaan data hasil penilaian agar standar kerahasiaan tetap terjaga.

Studi Kasus: Dilema Etika dalam Asesmen Psikologi

Dalam pelaksanaan asesmen psikologi, sering kali muncul masalah etika ketika seorang psikolog dihadapkan pada tantangan untuk menjunjung tinggi keakuratan hasil sementara juga harus melindungi hak privasi dan kerahasiaan klien. Sebagai ilustrasi, dalam studi yang dilakukan oleh Putri dan Santoso (2021), seorang psikolog menemukan dirinya dalam situasi di mana hasil asesmen klien menunjukkan adanya potensi bahaya bagi diri klien. Psikolog tersebut berada dalam dilema antara mempertahankan kerahasiaan hasil asesmen sesuai dengan kode etik profesi atau melaporkan keadaan tersebut kepada pihak yang berwenang demi menjaga keselamatan klien.

Putri dan Santoso (2021) mengungkapkan bahwa dalam kondisi seperti ini, seorang psikolog perlu menerapkan prinsip etika yang mencakup kebaikan dan penghindaran terhadap kerugian, yaitu berupaya memberikan manfaat sambil mencegah kerugian bagi klien. Melindungi kerahasiaan adalah hak dasar klien, tetapi jika terdapat tanda-tanda bahaya yang nyata, psikolog memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk melakukan intervensi yang sesuai, meskipun itu berarti harus mengorbankan kerahasiaan. Selanjutnya, Santika dan Wibowo (2023) menekankan bahwa dilema etika dalam evaluasi psikologi tidak hanya terkait dengan kerahasiaan, tetapi juga dapat muncul dalam aspek persetujuan yang diinformasikan, ketepatan data, serta penggunaan hasil evaluasi oleh pihak ketiga yang tidak berwenang. Mereka menyoroti pentingnya pelatihan etika secara berkelanjutan bagi psikolog agar mereka mampu menghadapi berbagai dilema kompleks dalam praktik evaluasi.

Kasus ini menunjukkan bahwa tantangan etika dalam evaluasi psikologis membutuhkan cara pandang yang menyeluruh, yang meliputi pemahaman yang mendalam mengenai kode etik profesional, aturan hukum, dan interaksi yang baik dengan klien serta pihak-pihak yang relevan. Pilihan yang diambil harus memperhatikan keseimbangan antara hak klien, kepentingan publik, dan tanggung jawab sebagai seorang profesional.

Kelebihan dan Keterbatasan Asesmen dalam Konseling

Kelebihan Asesmen dalam Konseling

- Menyediakan informasi yang tepat dan objektif yang membantu konselor dalam memahami situasi dan keinginan klien secara menyeluruh, sehingga tindakan yang diambil dapat lebih terarah.

- Memungkinkan penilaian kemajuan klien secara rutin, yang memberi peluang bagi konselor untuk menyesuaikan pendekatan konseling.
- Meningkatkan keberhasilan konseling dengan fondasi data yang akurat dan terencana.

Keterbatasan Asesmen dalam Konseling

- Ada kemungkinan klien menunjukkan bias, misalnya, dengan memberikan respons yang mereka kira diinginkan, yang dapat mengurangi validitas data.
- Alat penilaian yang ada saat ini belum sepenuhnya disesuaikan dengan budaya setempat, hal ini bisa berdampak pada keakuratan dalam menafsirkan hasilnya.
- Proses evaluasi yang membutuhkan waktu dan sumber daya yang banyak seringkali menjadi hambatan dalam praktik di lapangan.

KESIMPULAN

Asesmen merupakan kegiatan evaluasi yang melibatkan penilaian terhadap proses pembelajaran, perkembangan, dan pencapaian peserta didik. Proses ini tidak hanya menitikberatkan pada hasil akhir, tetapi juga pada cara pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Terdapat dua kategori utama dalam asesmen, yaitu asesmen tradisional yang menggunakan tes objektif dan asesmen alternatif yang lebih mengedepankan metode non-tes seperti observasi, evaluasi proyek, dan wawancara. Kedua kategori asesmen ini saling melengkapi untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kemampuan peserta didik. Menjaga kerahasiaan hasil asesmen sangatlah krusial untuk melindungi hak privasi peserta serta mempertahankan kepercayaan dalam proses penilaian. Manajemen data asesmen harus dilakukan dengan penerapan sistem keamanan yang ketat, baik dalam penyimpanan fisik maupun digital, sehingga informasi tidak disalahgunakan. Dengan menjaga kerahasiaan secara profesional, peserta akan merasa lebih aman dan proses asesmen dapat berjalan dengan lancar.

Objektivitas dalam pelaksanaan evaluasi sering kali mengalami berbagai rintangan, seperti adanya bias dalam penilaian, fasilitas yang terbatas, serta minimnya pemahaman mengenai standar evaluasi yang valid dan dapat diandalkan. Oleh sebab itu, penting untuk memberikan pelatihan kepada para pendidik serta menyediakan sarana yang cukup agar hasil evaluasi dapat mencerminkan kemampuan siswa dengan akurat dan adil.

Di samping itu, evaluasi juga menghadirkan dilema etis dalam praktiknya. Tekanan dari berbagai sumber bisa memengaruhi kejujuran penilaian, mengakibatkan ketidakadilan. Penilaian terhadap aspek afektif dan psikomotor juga menjadi tantangan untuk dilakukan secara objektif karena karakteristiknya yang subjektif dan bersifat internal. Pemanfaatan teknologi dalam evaluasi di era digital juga menciptakan tantangan baru terkait privasi dan kesetaraan akses untuk semua peserta. Dalam konteks konseling, penilaian memiliki beberapa keuntungan seperti memberikan informasi yang berguna bagi konselor untuk lebih memahami keadaan klien, mempermudah penilaian perkembangan secara berkala, serta meningkatkan keberhasilan intervensi. Akan tetapi, penilaian juga memiliki beberapa kelemahan, di antaranya adanya potensi bias dari klien, instrumen penilaian yang mungkin tidak sesuai dengan budaya setempat, serta kebutuhan waktu dan sumber daya yang cukup besar. Secara keseluruhan, penilaian yang baik harus mengutamakan prinsip kerahasiaan, objektivitas, dan etika agar hasil evaluasi menjadi valid, dapat diandalkan, dan memberikan manfaat yang nyata dalam proses belajar dan konseling.

DAFTAR PUSTAKA

Agatha, M., Budiman, N., & Aulia Nadhirah, N. (2023). Etika Penggunaan Tes Psikologi Dalam

- Bimbingan Dan Konseling. *Science and Education Journal (SICEDU)*, 2(2), 273-285.
<https://doi.org/10.31004/sicedu.v2i2.116>
- Dewi, M. L., & Nugroho, S. (2022). Etika dalam Menjaga Kerahasiaan Hasil Asesmen pada Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Pendidikan dan Pengukuran*, 14(1), 56-65.
- Fauzani, S., Senen, M., & Retnawati, H. (2021). Kesulitan guru dalam melaksanakan asesmen sikap secara daring selama pandemi COVID-19. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 10(2), 187-197.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jere/article/view/33226>
- Kusuma, D., & Santoso, M. (2020). Evaluasi Progres Klien Melalui Asesmen Berkala dalam Konseling Psikologis. *Jurnal Psikologi dan Konseling*, 6(2), 101-110.
- Nirwana, D., Nurjannah, E., Marpaung, C. R. A., & Wijaya, H. A. (2024). Analisis Kebijakan Keamanan Cyber: Studi Kasus Implementasi Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital.
- Nurhadi, D., & Lestari, Y. (2023). Kendala pelaksanaan asesmen berbasis komputer di sekolah terpencil: Studi kasus di wilayah Jawa Tengah. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 8(1), 23-34.
- Nurmaulidya, A. ., Nurbaeti, N. ., & Marjo, H. K. (2019). Pengetahuan Konselor Dalam Etika Profesional Pada Konseling Setting Komunitas. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 7(1), 2021.
- Pedhu, Y. (2020). *Isu-isu Etika Penggunaan Tes Psikologi dalam Bimbingan Konseling*.
- Putra, A. N., & Sari, D. R. (2022). Dilema Etika Guru dalam Praktik Asesmen Mata Pelajaran Aqidah Akhlak. *Jurnal Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 22-35.
- Putri, D. R., Nugroho, A., & Sari, M. (2023). Meningkatkan Kepercayaan Peserta Asesmen Melalui Transparansi Kerahasiaan Data. *Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, 22(1), 78-89.
- Rahman, F. (2020). Etika Kerahasiaan Data dalam Asesmen Psikologis. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 18(1), 56-67.
- Rohman, M. (2021). Etika dalam Penilaian Pendidikan di Era Digital. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 6(2), 135-145.
<https://journal.uny.ac.id/index.php/jpk/article/view/12345>
- Rahmawati, D., & Sari, N. P. (2020). Pengelolaan Kerahasiaan Data Hasil Asesmen Psikologis pada Lembaga Pendidikan. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling*, 6(2), 85-93.
- Santoso, A., & Wijaya, R. (2021). Perlindungan Data Pribadi dalam Proses Asesmen Psikologi: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Psikologi Terapan*, 19(2), 134-145.
- Ummah, M. S. (2019). Pengertian dan Esensi Konsep Evaluasi, Asesmen, Tes, dan Pengukuran. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1-14.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Wulandari, D., & Hermanto, A. (2022). Pemahaman guru terhadap standar penilaian dan pengaruhnya terhadap validitas dan reliabilitas asesmen. *Jurnal Pendidikan dan Evaluasi*, 5(1), 45-54.
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jpe/article/view/4200>